

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====
Tahun Sidang : 2006 - 2007
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Postel, Dirjen SKDI dan Kepala BRTI
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Juli 2007
Pukul : 18.15 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Dirjen Postel
3. Penjelasan oleh Dirjen SKDI
4. Penjelasan oleh Kepala BRTI
5. Tanya Jawab
6. Penutup
Hadir Anggota : ... orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : - Dirjen Postel, Basuki Iskandar
- Dirjen SKDI, Prof. Widiadnyana Merati
- Kepala BRTI, Basuki Iskandar beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Postel, Dirjen SKDI dan Kepala BRTI pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan pengaturan frekuensi, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan pembagian frekuensi sesuai dengan regulasi yang jelas, kontribusi yang memadai dari pihak pengguna frekuensi, serta tetap melindungi keberadaan frekuensi TV dan Radio komunitas serta TV local. Dalam hubungan, ini Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah memenuhi ketentuan alokasi 20 % untuk lembaga penyiaran publik, serta mengevaluasi pemberian biaya hak pemakaian frekuensi dan pengaturan alokasi frekuensi yang sudah diberikan kepada lembaga penyiaran.

2. Sehubungan dengan penting dan strategisnya peran satelit yang merupakan kebutuhan bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Komisi I DPR RI minta pemerintah mengatur pemetaan persatelitan dan pembagian penggunaannya melalui regulasi yang komprehensif agar negara dan masyarakat tidak dirugikan serta teknologi satelit dapat bermanfaat seoptimal mungkin bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat
3. Komisi I DPR RI minta agar industri BRTI menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen, tidak dicampuri oleh pemerintah, serta pelaksanaan regulasi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap yang melakukan pelanggaran. Dalam hubungan ini, BRTI perlu diberi wewenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran regulasi,
4. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk menjalankan regulasi telekomunikasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada dengan mendahulukan kepentingan nasional, termasuk dalam masalah pengembangan industri, kepemilikan, pemberian frekuensi, dan lisensi, agar industri strategis telekomunikasi dapat terus dibangun dan dikembangkan sebagai industri andalan nasional.
5. Mengingat lembaga penyiaran komunitas dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat karena sifat lembaga penyiaran komunitas tidak komersial dan tumbuh dari masyarakat daerah yang bersangkutan, Komisi I DPR RI minta pemerintah mendukung, mengembangkan dan mempermudah lahirnya lembaga penyiaran komunitas.
6. Komisi I DPR RI menilai pembangunan infrastruktur dan industri telekomunikasi perlu terus ditingkatkan dan memerlukan modal yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan regulasi dan pemberian insentif yang mampu menarik investasi, menegakan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta meningkatkan pengawasan terhadap para operator dengan penegakan hukum terhadap operator yang melanggar termasuk operator asing. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI berpendapat bahwa wacana buy back Indosat belakangan ini sudah keluar dari proporsi dan konteks yang semestinya, yaitu mekanisme pasar, serta tidak menguntungkan bagi pembangunan industri telekomunikasi, sehingga perlu dihentikan.
7. Keberadaan 10 operator dalam industri telekomunikasi membuat iklim persaingan semakin kompetitif. Oleh karena itu, regulasi pemerintah dalam bidang telekomunikasi perlu ditingkatkan, baik ditingkat kebijakan, pelaksanaan dan pengawasannya, agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif termasuk, dalam penentuan tarif telp hendaknya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan deviden, tetapi harus juga mempertimbangkan percepatan akses dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat luas.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 20.30 WIB.

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA

